

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini menjabarkan hasil dan pembahasan berdasarkan dari bab-bab sebelumnya. Berikut hasil dari penelitian mengenai Determinan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada OPD Pemerintah Kota Palembang.

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dibagikan kepada responden penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30 OPD yang ada di Kota Palembang. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, yaitu Kepala Subbagian Keuangan, Akuntan (pembuku) dan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran) diseluruh OPD Kota Palembang yang terdiri dari Dinas, Badan, Inspektorat, dan Satuan.

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	120	100%
Kuesioner yang kembali	92	77%
Kuesioner yang tidak kembali	28	23%
Kuesioner yang dapat diolah	92	77%

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan sebanyak 92 kuesioner (77%) dari 120 total kuesioner yang disebarkan.

4.1.2 Karakteristik Responden

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu berjumlah 92 pegawai atau staf bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi dari masing-masing klasifikasi demografis responden tersebut:

4.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	22	24%
Perempuan	70	76%
Total	92	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, Jumlah responden perempuan terhitung lebih banyak daripada responden laki-laki. Jumlah responden perempuan mencapai 76% dari total responden yang ada sedangkan laki-laki hanya 24% atau 22 responden dari total 92 responden.

4.1.2.2 Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan pada OPD khususnya pada pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan, dapat mempengaruhi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada OPD tersebut.

Tabel 4.3
Latar Belakang Pendidikan Responden

Keterangan		Jumlah	Persentase
Diploma III		28	30%
	Akuntansi	28	
	Non-Akuntansi	-	
Sarjana		64	70%
	Ekonomi	57	
	Non-Akuntansi	7	

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4.3, Jumlah responden dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih banyak bila dibandingkan dengan responden dengan latar belakang pendidikan diploma. Responden dengan lulusan sarjana sebanyak 70% atau 64 orang dari total 92 responden, sedangkan diploma dengan 30% atau sejumlah 28 orang dari 92 responden.

4.1.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup perhitungan dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standar deviation* (Sugiyono, 2016). Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden, dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap dimensi dan variabel yang sedang diteliti.

Tabel 4.4
Analisis Deskriptif

	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Kebijakan Akuntansi	92	51	85	73.67	8.943
Pemanfaatan Teknologi Informasi	92	27	45	38.49	4.889
Kompetensi SDM	92	29	60	49.55	8.343
Penerapan SAPD	92	27	45	38.40	5.108
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, hasil statistic deskriptif dapat diperoleh nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum, nilai standar deviasi, serta rasio *Skewness* dan rasio *Kurtosis* sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi

Variabel kebijakan akuntansi memiliki nilai rata-rata tengah 73,67 dengan nilai tertinggi diperoleh sebesar 85, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 51. Sedangkan untuk standar deviasi dari variabel kebijakan akuntansi diperoleh sebesar 8,943

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata-rata tengah 38,49 dengan nilai tertinggi diperoleh sebesar 45, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 27. Sedangkan untuk standar deviasi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh sebesar 4,889

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata tengah 49,55 dengan nilai tertinggi diperoleh sebesar 60, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 29. Sedangkan untuk standar deviasi dari variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh sebesar 8,343.

d. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki nilai rata-rata tengah 38,40 dengan nilai tertinggi diperoleh sebesar 45, dan untuk nilai terendah diperoleh sebesar 27. Sedangkan untuk standar deviasi dari variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah diperoleh sebesar 5,108.

4.1.4 Hasil Uji Kualitas Data

Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang tersebar pada 30 OPD Pemerintah Kota Palembang. Sebelum digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian, kuesioner diuji terlebih dahulu kesahihan (validitas) dan keandalannya (reliabilitas). Berikut ini hasil uji validitas dan reliabilitas untuk 92 responden pada penelitian ini.

4.1.4.1 Uji Validitas

Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas kali ini adalah daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid atau tidaknya suatu data.

Tabel 4.5
Uji Validitas Variabel Kebijakan Akuntansi (X₁)

Nomor	Korelasi Item – Total/r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,865	0,207	Valid
2	0,839	0,207	Valid
3	0,835	0,207	Valid
4	0,836	0,207	Valid
5	0,847	0,207	Valid
6	0,894	0,207	Valid
7	0,785	0,207	Valid
8	0,756	0,207	Valid
9	0,892	0,207	Valid
10	0,91	0,207	Valid
11	0,891	0,207	Valid
12	0,843	0,207	Valid
13	0,881	0,207	Valid
14	0,756	0,207	Valid
15	0,806	0,207	Valid
16	0,612	0,207	Valid
17	0,675	0,207	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kebijakan akuntansi yang berjumlah 17 butir pertanyaan memperoleh nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,207. Hal ini berarti alat ukur berupa pertanyaan pada kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat mengukur variabel kebijakan akuntansi yang diteliti.

Tabel 4.6
Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Nomor	Korelasi Item – Total/ r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,796	0,207	Valid
2	0,764	0,207	Valid
3	0,793	0,207	Valid
4	0,735	0,207	Valid
5	0,822	0,207	Valid
6	0,823	0,207	Valid
7	0,760	0,207	Valid
8	0,753	0,207	Valid
9	0,807	0,207	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi berjumlah 9 butir pertanyaan memperoleh nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,207. Hal ini berarti alat ukur berupa pertanyaan pada kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diteliti.

Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Nomor	Korelasi Item – Total/ r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,847	0,207	Valid
2	0,867	0,207	Valid
3	0,920	0,207	Valid
4	0,914	0,207	Valid
5	0,913	0,207	Valid
6	0,927	0,207	Valid
7	0,880	0,207	Valid
8	0,902	0,207	Valid
9	0,869	0,207	Valid
10	0,876	0,207	Valid
11	0,887	0,207	Valid
12	0,860	0,207	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel kompetensi sumber daya manusia berjumlah 12 butir pertanyaan memperoleh nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,207. Hal ini berarti alat ukur berupa pertanyaan pada kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia yang diteliti.

Tabel 4.8
Uji Validitas Variabel Penerapan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Y)

Nomor	Korelasi Item – Total/ r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Keterangan
1	0,557	0,000	0,207	Valid
2	0,651	0,000	0,207	Valid
3	0,896	0,000	0,207	Valid
4	0,904	0,000	0,207	Valid
5	0,918	0,000	0,207	Valid
6	0,919	0,000	0,207	Valid
7	0,851	0,000	0,207	Valid
8	0,874	0,000	0,207	Valid
9	0,826	0,000	0,207	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berjumlah 9 butir pertanyaan memperoleh nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,207. Hal ini berarti alat ukur berupa pertanyaan pada kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat mengukur variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diteliti.

4.1.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama pada kesempatan yang berbeda, ide pokoknya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran tersebut dapat dipercaya dan tetap konsisten. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau andal bila jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel bila menghasilkan nilai koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas secara singkat ditunjukkan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kebijakan Akuntansi (X1)	0,969	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,917	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,975	Reliabel
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Y)	0,939	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2021

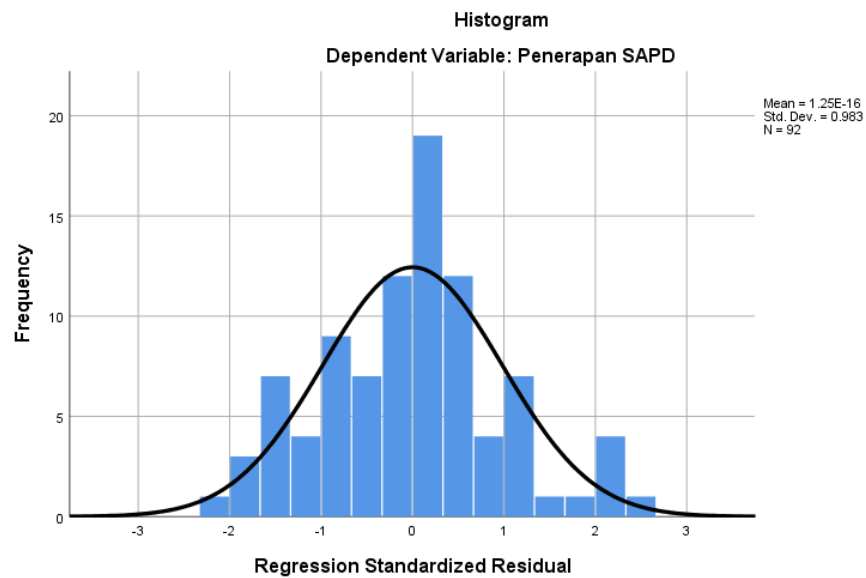
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai koefisien *Cronbach Alpha* dari masing-masing variabel. Pada variabel Kebijakan Akuntansi diperoleh nilai sebesar 0,969, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,917, Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,975 dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,939. Hal ini menunjukkan nilai r_{hitung} pada masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,6 yang berarti variabel pada penelitian kali ini reliabel.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam data penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain:

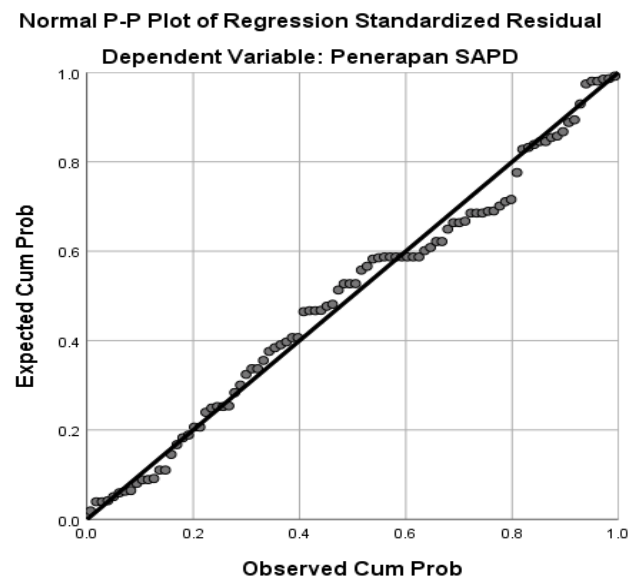
4.1.5.1 Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2012), Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.



Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Gambar 4.1
Grafik Histogram



Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Gambar 4.2
Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa grafik yang disajikan membentuk lonceng, dan berdasarkan pada gambar 4.2 bahwa titik *Probabilty Plot* menyebar mengikuti arah garis secara diagonal. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Tabel 4.10
Uji Kolmogorof Smirnov

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.98420862
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.062
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Normal atau tidaknya pendistribusian data juga dapat dilihat berdasarkan uji *Kolmogorov smirnov*. Diketahui jika nilai signifikan mencapai lebih dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel 4.10, nilai signifikan yang dihasilkan untuk data pada penelitian kali ini diperoleh sebesar 0,095, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2018), Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melihat nilai *tolerance* dan *VIF*.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kebijakan Akuntansi	.683	1.465
	Pemanfaatan TI	.561	1.783
	Kompetensi SDM	.506	1.975

a. Dependent Variable: Penerapan SAPD

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* ketika variabel memperoleh lebih dari 0,10 dan untuk nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* memperoleh kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresi antara variabel independen dengan nilai *absolute* residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.665	1.856		1.975	.051
	Kebijakan Akuntansi	-.041	.026	-.196	-1.548	.125
	Pemanfaatan TI	.054	.053	.142	1.012	.314
	Kompetensi SDM	-.008	.033	-.037	-.253	.801

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen melebihi nilai 0,05. Untuk variabel kebijakan akuntansi memperoleh nilai signifikan 0,125, pemanfaatan teknologi informasi 0,314, dan kompetensi sumber daya manusia 0,801. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.5 Uji Signifikan

4.1.5.1 Regresi Berganda

Analisis ini bertujuan mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.633	3.021		2.195	.031
	Kebijakan Akuntansi	.161	.043	.282	3.740	.000
	Pemanfaatan TI	.056	.087	.053	.643	.522
	Kompetensi SDM	.358	.054	.585	6.686	.000

a. Dependent Variable: Penerapan SAPD

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 persamaan regresi linear berganda data disusun sebagai berikut:

$$Y = 6.633 + 0,161X_1 + 0,056 X_2 + 0,358 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta atau α dalam penelitian kali ini adalah sebesar 6,633. Hal ini menunjukkan apabila variabel kebijakan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan (0) maka penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah bernilai 6,633
- b. Koefisien regresi variabel Kebijakan Akuntansi sebesar 0,161. Hal ini dapat diartikan Kebijakan Akuntansi berpengaruh positif, sehingga apabila Kebijakan Akuntansi dinaikkan 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,161%.
- c. Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,056. Hal ini dapat diartikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif, sehingga apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi dinaikkan 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,056%.
- d. Koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,358. Hal ini dapat diartikan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif, sehingga apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia dinaikkan 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebesar 0,358%.

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Uji hipotesis dengan uji t dengan mencari t-hitung dan membandingkannya dengan t-tabel.

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.633	3.021		2.195	.031
	Kebijakan Akuntansi	.161	.043	.282	3.740	.000
	Pemanfaatan TI	.056	.087	.053	.643	.522
	Kompetensi SDM	.358	.054	.585	6.686	.000

a. Dependent Variable: Penerapan SAPD

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Pengujian koefisien variabel Kebijakan Akuntansi didapatkan t-hitung sebesar 3,470 dengan nilai t-tabel sebesar 1,66 (lihat pada lampiran 8) yang dihasilkan melalui pada signifikansi 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $92-3-1=92$ (n:jumlah data dan k:jumlah variabel independen). Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ ($1,66 < 3,740$) dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain variabel kebijakan akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- b. Pengujian koefisien variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi didapatkan t-hitung sebesar 0,0643 dengan nilai t-tabel sebesar 1,66 (lihat pada lampiran 8) yang dihasilkan melalui pada signifikansi 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $92-3-1=92$ (n:jumlah data dan k:jumlah variabel independen). Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$ ($1,66 > 0,643$) dan dengan nilai signifikansi $0,522 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan kata lain variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

- c. Pengujian koefisien variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia didapatkan t-hitung sebesar 6,686 dengan nilai t-tabel sebesar 1,66 (lihat pada lampiran 8) yang dihasilkan melalui pada signifikansi 0,05/2 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $92-3-1=92$ (n:jumlah data dan k:jumlah variabel independen). Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa t-tabel < t-hitung ($1,66 < 6,686$) dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah.

4.1.6.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan baik positif atau negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1563.719	3	521.240	56.601	.000 ^b
	Residual	810.401	88	9.209		
	Total	2374.120	91			

a. Dependent Variable: Penerapan SAPD

b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan TI

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji F dapat diketahui F_{hitung} sebesar 56,601 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} diperoleh dengan nilai 2,71 (lihat pada lampiran 9) diperoleh melalui tingkat signifikansi 0,05 dengan $df_1=3$ dan $df_2=88$.

Berdasarkan penjelesan diatas, dapat diketahui bahwa F_{hitung} (56,601) > F_{tabel} (2,71) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara bersama-sama dan positif terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R Square atau R^2 yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.659	.647	3.035

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan TI

Sumber: Hasil pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan hasil uji determinasi seperti yang ada pada tabel 4.14, diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 atau sama dengan 65,9%. Angka tersebut mengandung arti persentase sumbangan pengaruh variabel Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.2 Pembahasan

Setelah melakukan pengujian dan mengambil keputusan maka penulis akan menjelaskan dan menguraikan seberapa besar pengaruh antara Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.2.1 Pengaruh Kebijakan Akuntansi terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t-hitung pada variabel Kebijakan Akuntansi diperoleh angka sebesar 3,740 dengan nilai t-tabel 1,66. Maka

t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Akuntansi memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Menurut Arifuddin (2015) Kebijakan Akuntansi bertujuan mengatur tata cara penyajian dari laporan keuangan yang ditujukan untuk umum dalam upaya lebih memudahkan dalam membandingkan antara anggaran dengan anggaran lain, periode yang satu dengan periode yang lain, maupun antara entitas akuntansi yang satu dengan entitas yang lain. Untuk memperoleh tujuan tersebut, kebijakan ini memutuskan semua pertimbangan dalam upaya penyajian laporan keuangan, standar urutan laporan keuangan, dan syarat minimal konten dari laporan keuangan.

Kebijakan ini berisi prinsip-prinsip, ataupun aturan yang lebih spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah biasanya mengatur dasar pengakuan, Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perihal pengakuan, metode pengukuran, serta prosedur pengungkapan akuntansi aktiva, hutang, modal, pendapatan, belanja, maupun pembiayaan serta tampilan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tersebut kemudian diterapkan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah yang merupakan rangkaian prosedur untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai pelaporan keuangan di lingkungan organisasi

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan SAPD pada pemerintah Kota Palembang diharapkan akan berjalan dengan baik sejalan dengan tepatnya kebijakan akuntansi yang dipilih oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang selaku penyelenggara pemerintahan telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk diterapkan pada OPD-OPD Pemerintah Kota Palembang selaku pengelola keuangan daerah. Kebijakan akuntansi tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya menghindari pelanggaran administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Palembang antara lain: Penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan beban, akuntansi pembiayaan, akuntansi asset, akuntansi ekuitas dana, laporan konsolidasian, laporan operasional dan lain-lain.

4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t-hitung pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diperoleh angka sebesar 0,643 dengan nilai t-tabel 1,66. Maka t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal ini mungkin saja terjadi karena dalam pemanfaatannya OPD Kota Palembang belum dapat memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh, indikator pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang usang mendapat respon paling kecil bila dibandingkan dengan indikator lainnya. Pemeliharaan dan

perbaikan peralatan merupakan unsur penting dalam pemanfaatan teknologi informasi, teknologi informasi yang ada tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pemeliharaan dan perbaikan secara berkala, dengan kata lain setiap unsur yang ada mestinya dapat diperhatikan demi tercapainya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dengan harapan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan baik pula penerapan SAPD yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kadek (2019) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap sistem informasi akuntansi. Teknologi informasi seperti komputer sejatinya dapat digunakan sebagai alat bantu kerja dalam menerapkan sistem akuntansi, diantaranya memiliki keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi dan didukung jaringan internet yang dapat menjadi penghubung antar unit pada OPD.

4.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t -hitung pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia diperoleh angka sebesar 6,686 dengan nilai t -tabel 1,66. Maka t -hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t -tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang. Hal tersebut didukung pada data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, diketahui bahwa 85 dari 92 responden memiliki latar belakang akuntansi yang tentunya akan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada OPD Pemerintah Kota Palembang.

Menurut Ermaya dalam Danial (2017), Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang

harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dengan kata lain semakin baik sumber daya manusia yang ada pada OPD Pemerintah Kota Palembang maka akan baik pula *output* yang dihasilkan, dalam hal ini penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang merupakan prosedur akuntansi dalam OPD Pemerintah Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nyoman (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah merupakan salah satu *output* dari penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan oleh OPD pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan baiknya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada akan sejalan dengan penerapan OPD yang diterapkan oleh OPD pemerintah Kota Palembang.

4.2.4 Pengaruh Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai pengaruh kebijakan akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (Y) memiliki nilai F-hitung sebesar 56,601 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independent pada penelitian kali ini berpengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis (H4) diterima.

Dari hasil perolehan nilai koefisien determinasi sebesar 65,9% yang menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 65,9% terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (Y), sedangkan sisanya sebesar 34,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan kebijakan akuntansi diterapkan oleh pemerintah daerah pada lingkungan OPD Pemerintah Kota Palembang maka memberikan pengaruh yang baik terhadap penerapan SAPD, didukung dengan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet yang memadai akan sangat membantu dan mempermudah pegawai khususnya staf keuangan yang ada di dalam OPD ketika melaksanakan tugasnya. Kedua hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa sumber daya manusia yang kompeten, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada OPD pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat menjalankan kebijakan akuntansi dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik agar tercapainya penerapan SAPD yang baik dan optimal pada OPD pemerintah Kota Palembang.